

**PERANAN KESETARAAN GENDER DALAM  
PENANAMAN NILAI KEBAIKAN**

Oleh:

**HASTUTI**

Pend Geografi, FIS, UNY

**Yogyakarta**

**2004**

## **GENDER EQUALITY ROLE IN THE INTERNALIZATION OF THE GODNESS VALUES**

### **Abstract**

The society of patriarchy culture confesses men's domination that causes the women place the subordinate position. This stereotype ties up the women so that they cannot freely involve themselves at decision making in every field of life, even the decision of their life's direction. Women are important figures of children's caring because this duty seems to be a must that become their domestical responsibility and task. Taking care of the children can be done by men and women, the social cultural construction makes the women be more responsible to do it. It is different with women's biological tasks that cannot be replaced i.e. pregnant, to born and to suckle.

Gender inequality suffers the women that make them have a low human capital. Furthermore it makes the women fall forward into powerless condition of making some choices because they have a very limited life spaces. Women's social control is very stick, there are many rules that must be obeyed. In other side, men have larger opportunities to choose everything in their life. Unempowering condition with the low independency even without, authority make the women chained in stupidity. Today, women start to work at public sector although they still also have to keep their domestical sector, so that women's jobs are getting more hard. It seems that this is the consequence of women who choose to work at public sector.

The demand of life need which is getting more and more stick and variate force the women to work and get some money to fulfill the life need. Meanwhile, women are demanded to do the children's taking care and make there children good i.e. always following the goodness values and avoidity morality decadence. Women empowering in the equality is the step that have to be fought. Women must not do the multiple role alone as if they are superwomen. Domestic roles in children taking care should not be charged as women's duty, but it should be the responsibility of men and women. It is the time to place the universal goodness values to and for men and women in equality as gender care values system.

**Keyword : GENDER EQUALITY, THE GODNESS VALUES**

## PERANAN KESETARAAN GENDER DALAM PENANAMAN NILAI KEBAIKAN

### Intisari

Masyarakat dalam budaya patriarki mengakui dominasi laki-laki sehingga perempuan di posisi ter subordinasi, menjadikan perempuan terbelenggu dalam ketidakberdayaan. Perempuan tidak mampu terlibat secara leluasa dalam pengambilan keputusan di segala bidang termasuk yang berkaitan dengan penentuan arah kehidupan perempuan itu sendiri. Perempuan merupakan sosok penting dalam pengasuhan anak bangsa bahkan tugas tersebut seolah sebagai kewajiban yang menjadi tanggung jawab perempuan di sektor domestik. Tugas pengasuhan anak sebenarnya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, namun konstruksi sosial budaya seolah menjadi kewajiban perempuan sebagaimana tugas hamil, melahirkan dan menyusui.

Ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan sehingga memiliki *human capital* rendah semakin menjerumuskan perempuan sehingga tidak memiliki kesempatan dan pilihan turut serta berkompetisi dalam kehidupannya. Bahkan kontrol sosial budaya terhadap perempuan cenderung lebih ketat dengan berbagai tata nilai yang harus ditaati. Sementara laki-laki memiliki kesempatan yang lebih luas melakukan pilihan dalam kehidupannya. Perempuan dengan tingkat kemandirian yang rendah bahkan tanpa otoritas menjadikan perempuan terbelenggu dalam keterbelakangan. Saat ini perempuan mulai melakukan pekerjaan di sektor publik meskipun sektor domestik harus tetap menjadi tugas perempuan sehingga beban perempuan menjadi sangat berat. Kondisi ini seolah harus menjadi konsekuensi perempuan apabila menjatuhkan pilihan melakukan kegiatan di sektor publik.

Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin ketat dan bervariasi memaksa perempuan bekerja agar memperoleh pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Sementara perempuan dituntut tetap melakukan pengasuhan anak bangsa dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan agar dapat terhindar dari keterpurukan dan dekadensi moral yang berkepanjangan. Langkah yang perlu diupayakan adalah pemberdayaan perempuan untuk memperoleh kesetaraan tanpa harus melakukan *multiple role* sendirian sebagai *superwoman*. Tugas domestik dalam hal ini pengasuhan anak bangsa tidak harus dibebankan sebagai kewajiban perempuan namun harus menjadi tanggung jawab bersama antara laki laki dan perempuan. Nilai nilai kebaikan secara universal seharusnya ditanamkan oleh dan untuk perempuan maupun laki -laki sebagai tata nilai bermuatan peka gender.

Kata Kunci : KESETARAAN GENDER, NILAI KEBAIKAN

## **Pendahuluan**

Dinamika perubahan ditandai cepatnya penyebaran informasi, pendeknya waktu tempuh ke berbagai belahan bumi merupakan fenomena yang mendominasi era global. Ketatnya persaingan dan beban hidup yang semakin berat dihadapkan dengan tata nilai yang semakin longgar dengan pesatnya kemajuan teknologi yang diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia memberi dampak pada perubahan gaya hidup. Konsumerisme sengaja diciptakan ternyata berhasil mewarnai gaya hidup manusia, tatanan dunia cenderung dipengaruhi sistem kapitalistik dengan paradigmanya ingin mendominasi percaturan global (Naisbit, 2000: 18). Sistem tersebut akan memanfaatkan setiap peluang guna membangun kekuatan menguasai dunia dari sisi ekonomi, politik, teknologi, ilmu pengetahuan bahkan ideologi sehingga pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan sengaja dibangun dalam pengaruhnya.

Paradigma pembangunan yang mengemuka sejak era 1970 an dipergunakan sebagai dalih ingin memajukan tata kehidupan dunia merupakan salah satu kepanjangan sistem kapitalis, ironisnya paradigma tersebut justru banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Mansour Fakhil, 2002 : 200). Paradigma tersebut dinilai sebagai langkah mujarab untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia sehingga dipergunakan sebagai alat melegitimasi setiap keputusan demi pembangunan, meskipun dampaknya banyak kelompok yang terpaksa terpinggirkan. Kelompok yang paling lemah yang seharusnya mendapat prioritas perhatian justru dikorbankan, demikian pula perempuan yang selama ini merupakan kelompok yang ter subordinasi sering menjadi korban.

Secara eksplisit peranan perempuan dalam proses pembangunan mendapat perhatian luas yang ditandai dengan banyaknya tulisan-tulisan dengan topik perempuan, pembangunan dan gender serta paket pembangunan dengan dalih untuk mengangkat perempuan agar mampu berperan dalam proyek peningkatan kesejahteraan umat manusia (Mansour Fakih, 2002: 227). Namun demikian kontroversi terpinggirkannya perempuan sebagai dampak pembangunan terus mengedepan meskipun gagasan untuk mendudukan perempuan secara proporsional telah dilontarkan (Caroline O. N. Moser, 1989: 69). Gagasan pengintegrasian perempuan dalam pembangunan sampai upaya mengedepankan gender dalam pendekatan pembangunan masih belum mampu membawa perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki secara proporsional.

Perbedaan hakiki perempuan dengan laki-laki terletak pada fungsi biologis, sebagai ketetapan takdir yang tidak dapat dipertukarkan secara fungsional. Perbedaan yang dihasilkan dari konstruksi sosial dan kultural antara perempuan dan laki-laki seharusnya dapat dipertukarkan secara fleksibel. Konstruksi sosial kultural tersebut banyak diilhami oleh konstruksi biologis yang seolah *given* dan alamiah (Arief Budiman, 1998 : 43). Membebaskan perempuan untuk menekuni kegiatan publik tanpa bias gender, masih harus diperjuangkan karena ketidakadilan terhadap perempuan masih selalu dijumpai. Ditambah dengan keraguan untuk menjadikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan menjadikan setiap kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender dengan lebih mengedepankan kepentingan laki-laki. Wajar apabila pembangunan melahirkan produk yang banyak menyudutkan perempuan ambil saja contoh

pembangunan pertanian di Jawa sejak tahun 1970 an telah menggeser tenaga kerja perempuan dari sektor pertanian (Boserup, 1984 : 6; Geertz, 1988 :11).

Kesetaraan perempuan dan laki-laki masih harus terus diperjuangkan guna memanfaatkan setiap peluang sehingga perempuan tidak terbelenggu sebagai sosok *human capital* rendah. Selama ini keberadaan perempuan dianggap sebagai pelengkap laki-laki, sejak diciptakan manusia pertama, penderitaan dan ketidakadilan terhadap perempuan terus berlangsung tanpa mengenal batas ruang dan waktu (Margiyani dan Alimi, 1999; Nasarudin Umar, 1999 : 11; Hastanti, 2002: 6). Pemberdayaan perempuan agar memiliki *human capital* yang memadai sehingga mampu berkompetisi secara transparan dengan lawan jenisnya merupakan langkah yang harus selalu diperjuangkan sehingga ada pengakuan atas keberadaan dan kemampuan perempuan. Perempuan merupakan sosok penting dalam membentuk anak bangsa sebagai generasi masa depan oleh karena itu ketimpangan gender yang melanda perempuan akan mempengaruhi penanaman nilai kebaikan mengingat pengasuhan dan pemeliharaan anak sampai saat ini masih dianggap sebagai tugas perempuan.

Penanaman nilai yang terhindar dari bias gender diharapkan dapat menuntun perubahan cara berpikir manusia, agar dapat mengenali problem dasar, dan menghindarkan dari kegamangan menatap masa depan. Oleh karena itu penanaman nilai yang diwarnai bias gender akan memiliki peranan dalam ikut serta mengokohkan ideologi bias gender dalam penanaman nilai kebaikan. Tata nilai yang diterapkan pada perempuan cenderung lebih rumit dan ketat sehingga kesan standard ganda mewarnai penilaian masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku atas laki -laki dan perempuan. Oleh karena itu diperlukan upaya mencari format penanaman nilai kebaikan yang

bermuatan peka gender agar tata nilai berlaku universal. Diharapkan ada langkah pencerahan guna melahirkan manusia yang lebih mampu mengaktualkan diri secara optimal baik kepada laki- laki maupun perempuan mendasarkan kemampuan yang ada secara transparan.

## **Pemberdayaan Perempuan menuju Kesetaraan Gender**

Gender merupakan nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki -laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam hal ekonomi, politik, sosial di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa (Brett, 1991: 7; Mansour Fakih, 1996 : 36 dan Ratna Megawangi, 1999 : 88). Gender sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Perbedaan berdasarkan konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Women's Studies Encyclopedia). Gender merupakan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan sejalan dengan ini pendapat kaum feminis, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (Hilary M. Lips, 1993 : 99). Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Perbedaan gender akan memunculkan permasalahan apabila terjadi ketidakadilan antara laki- laki dan perempuan yang pada umumnya memposisikan perempuan terpinggirkan dan tersubordinasi.

Pemberdayaan atau “empowerment” berarti *a more active and critical approach towards* (Goodman, 1987 :29). Pemberdayaan merupakan upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan kemampuan yang ada. Anggaran pemberdayaan perempuan selayaknya mendapat 5% dari total APBN agar segera mengena sasaran, mengingat ranking GDI (*Gender Development Index* / Pembangunan Gender) Indonesia terus turun. Dari ranking ke-88 pada tahun 1995, turun ke ranking 90 (dari 174 negara) tahun 1998, turun lagi ke ranking 92 (dari 162 negara) pada tahun 2001. Di lingkungan Asean, berdasarkan survei UNDP, pada tahun 1999, GDI Indonesia berada di ranking 7 dari 10 negara, dengan skor 67,1. Indonesia cuma berada di atas Laos PDR, Kamboja, dan Myanmar, itu.

Perempuan terpinggirkan dalam posisi subordinasi pada struktur sosial budaya patriarki sehingga menjadi norma yang sulit untuk melakukan perubahan guna pemberdayaan perempuan. Tanpa kemauan yang keras dari seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah yang memiliki perangkat kuat dalam penentuan kebijakan akan kesulitan segera mewujudkan perubahan secara signifikan. Disebutkan bahwa selama ini perempuan tersubordinasi karena beberapa faktor antara lain Aileen.M Stewart dalam (Berninghausen, tanpa tahun), menyebutkan:

1. Pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut paham patriarki
2. Banyak produk hukum dan peraturan perundangan yang bias gender
3. Kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender
4. Penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat
5. Kelemahan, kurang percaya diri, dan inkonsistensi serta tekad kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Sehingga perlu kebijakan pemberdayaan perempuan melalui: (a) pemberian keahlian dan pembekalan keterampilan atau kompetensi tertentu (*expert power*), (b) pemberian peran dan peluang (*role power*), dan (c) pemberian fasilitas dan kemudahan untuk mewujudkan kemampuan (*resource po*) tersebut.

Para peneliti dari PSPK (Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan) UGM, Yogyakarta mengusulkan untuk pemberdayaan perempuan diperlukan:

(1) perubahan cara berpikir lebih kritis (2) pemberian peluang yang lebih luas bagi partisipasi laki-laki dan perempuan, (3) penemuan konsep diri untuk meningkatkan percaya diri perempuan, (4) pemberian kesempatan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, (5) perluas ruang gerak dan kesempatan bagi partisipasi perempuan, dan (6) perubahan tata nilai dan struktur kelembagaan dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat.

Masyarakat Indonesia dengan budaya patriarki, sebagai telah dikeketagui bahwa konstruksi sosial budaya masyarakat patriarki telah membentuk pola pikir, sikap dan perilaku terhadap perempuan. Perempuan cenderung ter subordinasi dan terpinggirkan sehingga tidak mempunyai kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri. Mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki secara adil memerlukan reaktualisasi konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah harapan masyarakat mengenai pola pikir, sikap dan perilaku perempuan dan laki-laki yang dapat dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu secara bervariasi menurut kondisi sosial dan budaya (Berninghausen, Jutta and Kerstan Birgut, 1992). Kesetaraan gender tidak cukup hanya sebagai diskursus tetapi memerlukan sosialisasi dan penerapan dalam seluruh lini aktifitas dengan dilandasi pola pikir dan sikap serta perilaku masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki dapat menjangkau seluruh sumber daya secara berkeadilan.

Saat ini perempuan telah banyak memasuki dunia publik dengan aktivitas produktif yang pada awalnya tabu bagi perempuan. Konsep baru ini memerlukan kearifan perempuan untuk menentukan pilihan mengingat penilaian atas perempuan adalah keberhasilan di sektor publik selalu dilihat dari keberhasilan di sektor

domestik. Stereotipe yang selama ini dibentuk dari hasil konstruksi sosial budaya terhadap perempuan, masih tetap melekat di berbagai bidang meliputi bidang sosial, budaya, politik, hukum. Perempuan masih harus berjuang untuk mengembangkan kemampuan di berbagai bidang tersebut dengan kompetisi yang lebih ketat sementara disisi lain tugas domestik dianggap sebagai satu kodrat perempuan. Seharusnya kodrat perempuan hanya yang terbentuk dari konstruksi biologis (hamil, melahirkan dan menyusui) tetapi telah terjadi salah kaprah sehingga melahirkan pembedaan perempuan dan laki-laki pada konstruksi sosial budaya sehingga membawa perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan.

Pendekatan perempuan yang dikonstruksi sosial budaya merupakan bahasan yang memerlukan perhatian agar tercapai satu pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan yang saling mendukung mulai dari rumah tangga hingga komunitas di skala global. Jere Behrman dengan *Household Research Theory* dalam Ratna Megawangi (1997) menyebutkan bahwa alokasi sumber daya keluarga:

1. *Pure investment model* yaitu ketika orang tua mengalokasikan sumber daya yang ada pada anak anaknya mengikuti model investasi murni. Model ini akan berlaku apabila keluarga dalam kondisi miskin, di mana sumber daya yang ada di alokasikan pada sektor yang paling menguntungkan.
2. *Model investasi* dimana orang tua bersikap netral yaitu orang tua akan mengalokasikan sumber dayanya secara merata pada seluruh anak anaknya tanpa preferensi gender tertentu. *Model Rawlsian / John Rawls/ Theory of Justice* berlaku ketika sumber daya cenderung lebih merata.
3. *Compensated Strategy* di mana alokasi yang lebih mementingkan pihak yang lebih menderita berlaku pada keluarga yang sumber dayanya tidak terbatas lagi dan pertimbangan moral.

Perempuan akan terabaikan sehingga tidak memperoleh prioritas dalam pengembangan sumberdaya terutama dalam kondisi yang miskin sebagaimana terjadi di masyarakat miskin di pedesaan. Di Indonesia masih ada 25,7 juta penduduk miskin 66,9 persen penduduk miskin berada di pedesaan, disebutkan pula bahwa 63 persen rumah tangga miskin bersumber dari kegiatan pertanian (BPS, 2002). Perempuan pedesaan menghasilkan 60-80% produk pertanian tetapi bila ada pelatihan-pelatihan pertanian, laki-laki lah yang dilibatkan dalam pelatihan tersebut (Boserup, 1984). Sebenarnya memang banyak pelatihan yang ditujukan untuk kaum perempuan, tetapi pelatihan-pelatihan tersebut lebih banyak untuk menunjang peran domestik perempuan (proses domestikasi) dan kadang malah semakin melembagakan ideologi bias gender (Tim Community & Gender Development, 2003). Keterbatasan modal yang dimiliki perempuan menjadikan perempuan semakin terbelenggu di dalam ketidakberdayaan sehingga perempuan menjadi terpinggirkan ke sektor yang tidak produktif. Masih ditambah dengan konstruksi sosial budaya yang mendorong perempuan tetap berada pada posisi mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan kurang produktif di anggap paling cocok untuk perempuan karena rendahnya *human capital* yang dimiliki.

Ketimpangan perempuan dan laki-laki bermula dari ideologi yang sulit bergeser bahwa perempuan dianggap sebagai orang yang berkiprah di sektor domestik dan laki-laki dianggap sebagai orang yang berkiprah di luar rumah tangga yang dikenal sebagai sektor publik. Hal yang perlu diperhatikan adalah: *Pertama* bagaimana dikotomi domestik dan publik atau *nature* dan *nurture/ culture* terbentuk dalam konteks tertentu. Pertanyaan ini mengarah pada pencairan kekuatan yang telah membentuk dua domain menjadi dominasi versus subordinasi. *Kedua* proses sosial,

budaya, ekonomi dan politik apa yang telah menyebabkan dikotomi domestik publik menguat dan di lestarikan sebagai realitas yang tidak perlu di pertanyakan keabsahannya. *Ketiga* dalam hal apa ekspansi dari sektor domestik ke sektor publik, apakah rekonseptualisasi *nature* dan *culture* dapat terjadi.

Pada hakekatnya perbedaan perlakuan terhadap laki- laki dan perempuan apakah kontruksi sosial atau faktor biologis tidak mudah untuk di lakukan perubahan. Walaupun struktur sosial sudah di buat sedemikian rupa agar perbedaan gender tidak melekat pada perempuan saja namun juga pada laki- laki (Mansour Fakhih, 1997 : 77 dan Ratna Megawangi, 1999 : 101). Selama ini standard yang di digunakan untuk membedakan laki- laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial adalah laki -laki maskulin, independen, otonom, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, berorientasi linier progresif dan perempuan dilekatkan dengan sifat feminisme, keterikatan, dependen, terpengaruh, berkorban, tidak mampu mengontrol keadaan serta orientasi sirkuler. Perbedaan tersebut melahirkan dikotomi antara laki -laki dan perempuan yang cenderung menguntungkan laki- laki sehingga menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dari kegiatan publik yang dianggap lebih pantas dilakukan laki- laki.

### **Penanaman Nilai Kebajikan yang bermuatan Peka Gender**

Upaya terus dilakukan untuk mengatasi keterpurukan yang melanda Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Pencerahan agar Indonesia menjadi bangsa terhormat dan diperhitungkan keberadaannya mulia di muka bumi ini dilakukan tak terkecuali dengan mengkaji kembali terhadap nilai –nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam tatanan

kehidupan bermasyarakat selama ini. Budaya adiluhung yang dimiliki pendahulu bangsa ini seolah musnah dan mengalami degradasi. Masyarakat muncul dengan karakter budaya yang mengedepankan individualisme, konsumerisme sehingga orientasi kehidupan bukan lagi pada menjunjung tinggi harkat dan martabat tetapi mengedepankan ukuran materiil. Masyarakat telah mengalami perubahan sikap mental sebut saja kemajuan yang mampu diraih dan penilaian kehormatan diukur dari penguasaan material bukan lagi atas keluhuran budi pekerti. Keluhuran budi pekerti tersisihkan dari derap kehidupan sehingga Indonesia mengalami keterpurukan.

Kondisi yang melanda Indonesia saat ini satu dekade yang lalu telah disadari oleh negara adidaya USA di tahun 1990. Negara yang terus memimpin dalam percaturan dunia melalui panggung politik, penguasaan ilmu dan teknologi menyadari pentingnya reaktualisasi nilai – nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga nilai kebaikan mulai ditinjau kembali untuk dijadikan pedoman dalam berkehidupan (Lickona, 1992). Nilai kebaikan tersebut meliputi kepercayaan (*trustworthies*), saling menghargai (*respect*), bertanggung jawab (*responsibility*), adil (*fairness*), kasih sayang (*caring*) dan kewarganegaraan (*citizenship*) Nilai- nilai seperti itu kurang mendapat perhatian dalam membangun bangsa Indonesia saat ini ditandai dengan meluasnya KKKN (Korupsi, Kolusi, Koncoisme dan Nepotisme). KKKN yang merebak saat ini dan banyak mendatangkan kerugian ternyata pemberantasan terhadap penyakit tersebut sulit dilakukan sebagaimana kesulitan memutus mata rantai lingkaran yang kesulitan mencari ujung pangkalnya meskipun disadari menjadi penyebab utama bangsa Indonesia terperosok dalam keterpurukan multidimensi.

Nilai kebaikan meliputi kemampuan empati, memahami perasaan sendiri, mengungkapkan perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, memecahkan masalah antar pribadi, kesetiakawanan, keramahan, kejujuran, menghormati orang lain dan menumbuhkan rasa tanggung jawab ( Maman dkk, 2003). Karakter pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi *roso pangroso* sebenarnya merupakan pengejawantahan dari nilai- nilai kebaikan yang harus dikedepankan dalam setiap pengambilan keputusan hampir ditinggalkan oleh penerusnya. Mengedepankan kepentingan diri sendiri dan kroninya lebih tanpa menghiraukan sekitar lebih mendominasi hingga munculnya benturan antar kepentingan dan kekecewaan yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998 dan pemulihan ekonomi belum tuntas hingga tahun 2004 sementara negara tetangga dengan kondisi yang sama telah kembali bangkit menuju ekonomi yang lebih maju. Ternyata kondisi Indonesia yang dilanda krisis ekonomi menjadi krisis multi dimensi menjadikan kian terjerembab dalam keterpurukan. Kualitas sumber daya manusia HDI 109 dari urutan 120 negara, tingkat korupsi tinggi 9,92 dari skor 10 (UNDP, 2000: 21 dan Survai PERC, 2003 : 25). Berbagai solusi pemecahan masalah telah diupayakan melalui perbaikan institusi terkait sebagai contoh dalam pendidikan mulai dari perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga peningkatan sarana prasarana pendidikan terus dibenahi bahkan secara menyeluruh pada institusi pemerintahan menyangkut hukum, ekonomi, kesehatan, transportasi komunikasi. Keterpurukan memicu perpecahan sehingga muncul saling tuding diantara elemen bangsa. Institusi

mana yang seharusnya bertanggung jawab agar pengentasan krisis multidimensi tersebut sampai saat ini belum dapat dirumuskan secara tepat.

Berdasarkan hasil Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia tahun 2000, proporsi penduduk perempuan di Indonesia mencapai 50,04 persen dari seluruh jumlah penduduk yaitu 101,6 juta jiwa perempuan dan 101,4 juta jiwa laki-laki (Susenas, 2000). Kesetaraan gender masih harus diperjuangkan agar perempuan yang merupakan separuh lebih jumlah penduduk dapat sebagai satu kekuatan yang diharapkan mampu turut serta menopang dalam perkembangan kehidupan guna mewujudkan kemajuan bangsa. Apabila perempuan memiliki kemampuan optimal guna pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara baik di sektor publik maupun domestik berarti separuh kekuatan bangsa ini dapat dimanfaatkan.

Perempuan merupakan sosok penting dalam satuan rumah tangga di Indonesia sementara kesetaraan gender masih harus diperjuangkan agar perempuan dapat memiliki kesempatan yang sejajar dengan lawan jenisnya. Rendahnya partisipasi, akses, dan kontrol yang dimiliki serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan, antara lain dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (43,5%) dibandingkan dengan TPak laki-laki (72,6%) itupun perempuan banyak terserap di pekerjaan dengan upah rendah (Susenas 1999). Posisi tawar perempuan dianggap masih rendah sehingga perempuan selalu terpinggirkan dalam setiap langkah guna membangun bangsa dan negara mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Setiap produk dan kebijakan pembangunan akhirnya selalu menguntungkan kelompok yang banyak terlibat dalam proses pembangunan yakni laki-laki, tak terkecuali dalam membangun sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan kualitas

melalui penanaman nilai – nilai kehidupan yang seharusnya dijadikan sebagai kaidah bermasyarakat.

Pola pengasuhan mulai dari tingkat rumah tangga hingga masyarakat luas yang berlangsung selama ini lebih menonjolkan dominasi laki-laki. Sosok laki-laki digambarkan lebih pas pada jenis kegiatan yang memerlukan keahlian, kesigapan, fisik yang kuat, mobilitas tinggi, mampu mengelola kepemimpinan. Sementara perempuan, melakukan pekerjaan di seputar pekerjaan untuk peran reproduktif dan sektor domestik sehingga perempuan sebagai penanggung jawab utama pada sektor domestik. Sementara di sektor publik perempuan merupakan kelompok yang terakhir di beri pekerjaan karena konsep patriarki mengkonstruksikan laki-laki adalah pencari nafkah utama dan kepala keluarga. Sementara perempuan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan publik dituntut pembatasan yang harus sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Diakui bahwa dalam masyarakat patriarki memang ada stereotipe peran laki-laki terhadap perempuan. Di dalam masyarakat patriarki konsep pola asuh yang diberikan tentu saja menempatkan peran laki-laki yang lebih menonjol.

Selama ini nilai kebaikan cenderung bias gender masih banyak ditemukan di dalam penanaman nilai sehingga melahirkan generasi dengan perilaku dan sikap yang menganggap nilai kebaikan yang cenderung bias gender (Yayan, 2002). Penanaman nilai- nilai kebaikan bias gender akan semakin menguatkan dominasi laki-laki karena dengan kemampuan yang dimiliki lebih mampu menyerap nilai- nilai kebaikan dibanding lawan jenisnya. Penanaman nilai peka gender diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan bermoral mulai dari tingkat rumah tangga hingga masyarakat luas karena rumah tangga merupakan pondasi dasar

pembentukan kepribadian. Penanaman nilai kebaikan secara universal yang berkeadilan tanpa pembedaan gender diharapkan dapat meningkatkan kualitas perempuan menjadi *human capital* potensial.

Perempuan diharapkan dapat menjadi salah satu agen sosialisasi nilai-nilai kebaikan mulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat luas. Perempuan adalah tiang negara, apabila satu negara rusak perempuannya niscaya merupakan keruntuhan sebuah negara akan segera menjelang (HR Buchori Muslim). Melalui perempuan masih dipercaya sangat potensial membentuk dasar pola pikir anak bangsa. Internalisasi nilai kebaikan sehingga terbentuk pola sikap dan perilaku hingga ke jenjang lebih lanjut, bisa dijadikan indikator bagaimana perspektif nilai kebaikan tersosialisasikan di dalamnya. Melalui penanaman nilai kebaikan yang tepat oleh perempuan yang mengerti akan arti penting nilai kebaikan di dasarnya perubahan global yang semakin dinamis dan serba cepat diharapkan manusia berbudi luhur dapat diwujudkan.

Penanaman nilai kebaikan diharapkan dapat memberi angin segar sehingga pencerahan dapat terwujud, diawali dari penanaman nilai kebaikan dalam kehidupan mulai dari tingkat rumah tangga hingga masyarakat secara luas. Rumah tangga merupakan tempat anak bangsa tumbuh dan berkembang sehingga dari wadah ini langkah penanaman nilai kebaikan seharusnya berawal sebelum berhadapan dengan masyarakat luas. Selanjutnya setelah terjun di masyarakat anak-anak bangsa telah berbekal dengan kepribadian yang menjunjung tinggi nilai kebaikan akan saling berinteraksi dan berakumulasi sehingga membangun satu komunitas yang diwarnai dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kebaikan. Pada hakekatnya pola asuh yang tepat dari tingkat rumah tangga akan dibawa ke masyarakat berhadapan dengan sistem

budaya yang ada didalamnya. Apabila masyarakat tersebut terbentuk dari pribadi pribadi yang berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi harkat martabat serta kehormatan diharapkan pencerahan dapat terwujud di negeri ini.

Model penanaman nilai kebaikan sebagai bagian yang seharusnya dikembangkan dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia tentu saja masih didominasi kepentingan laki- laki dalam kondisi perempuan ter subordinasi. Perempuan disinyalir selalu lebih mengedepankan *roso pangroso* dalam mengambil keputusan sesuai dengan watak dasar yang telah dilekatkan pada perempuan dimana rasa tersebut merupakan salah satu kendala untuk mencapai kemajuan. Kombinasi yang setara antara laki laki dan perempuan dalam kondisi kesejajaran sangat diperlukan dalam penanaman nilai nilai kebaikan agar memiliki perspektif peka gender. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut kebijakan yang dikembangkan saat ini dan mendatang harus mengintegrasikan unsure laki laki dan perempuan. Pengintegrasian tersebut meliputi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga nilai nilai kebaikan dengan muatan peka gender dapat dijadikan patokan dalam kehidupan di seluruh lapisan masyarakat.

Penanaman nilai kebaikan yang erat kaitannya dengan budi pekerti selayaknya ditanamkan sejak dari tingkat keluarga hingga masyarakat luas memerlukan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat. Selama ini apabila ada kekeliruan tentang penanaman nilai kebaikan pada generasi penerus karena tanggung jawab pendidikan anak mulai pada tingkat rumah tangga cenderung dibebankan perempuan sehingga perempuan dituding tidak mampu memainkan perannya. Sementara dalam

pencapaian satu keberhasilan niscaya dianggap sebagai kesuksesan sulit diperoleh penilaian yang terbaik untuk perempuan.

Melalui penanaman nilai kebaikan diharapkan mampu untuk menciptakan ruang guna mengidentifikasi maupun menganalisis secara bebas dan kritis agar transformasi sosial dengan "memanusiakan" manusia dalam sistem dan struktur yang berkeadilan dapat diwujudkan. Redefinisi kembali mengenai kehidupan dengan tata nilai yang mengandung unsur nilai kebaikan perlu dilakukan dan dipahami ke seluruh lapisan masyarakat dari skala mikro hingga makro. Tanpa upaya tersebut penanaman nilai kebaikan secara berkeadilan hanya sebuah keniscayaan yang hanya akan menjadi wacana (*discourse*) beberapa kalangan tanpa terserap dan dipahami sebagai nilai yang seharusnya dimiliki untuk dilaksanakan oleh seluruh individu. Sosialisasi nilai kebaikan melalui kelembagaan formal dan non formal diharapkan segera dapat diserap oleh seluruh individu sehingga menjadi satu tata nilai. Serangkaian nilai kebaikan melalui pemahaman secara komprehensif seharusnya dihayati dan dilaksanakan agar terwujudnya pencerahan.

## **Simpulan**

Terjadinya krisis multidimensi memerlukan penyelesaian dengan multi disiplin serta model solusi yang bervariasi. Solusi banyak dikaji melalui berbagai ranah baik hukum, politik, ekonomi, sosial namun ibarat mengobati penyakit yang telah kronis hanya dengan kesabaran dan kejelian serta langkah cerdas diharapkan mampu untuk mengurai benang kusut keterpurukan. Akar permasalahan yang perlu diungkap kembali adalah upaya menyusun kembali satu konsep yang kemudian dapat dijadikan satu paradigma yakni melalui penanaman nilai kebaikan yang diberikan secara

berkeadilan antara laki- laki dan perempuan. Perempuan sebagai sosok penting dalam pengasuhan individu dari lingkup terkecil yakni di tingkat rumah tangga memegang peranan penting dalam pengenalan nilai kebaikan. Namun demikian pengasuhan anak bangsa tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab perempuan sendirian.

Perbaiki kondisi sehingga perempuan mencapai kesetaraan dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat mendorong perempuan terjun ke sektor publik menuntut perempuan dapat bertindak bijaksana. Kewajiban domestik dan publik seharusnya menjadi tanggung jawab bersama laki- laki dan perempuan utamanya dalam pengasuhan anak bangsa. Manusia yang memiliki sikap, perilaku dan pola pikir yang diwarnai dengan penerapan nilai -nilai kebaikan dalam kehidupan yang berkeadilan niscaya dapat menjadi pengawal masa depan yang bertanggung jawab sehingga tercipta kehidupan seimbang selaras dan sejahtera.

### Daftar Pustaka

- Arief Budiman, 1990. *Pergeseran Peran Laki Laki dalam Rumah Tangga : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta
- Berninghausen, Jutta, tanpa tahun. *Gender Glossary for Projects under Technical Cooperation National and Technical Vocation Education and Training Program*, GTZ. Jakarta
- Berninghausen, Jutta and Kerstan Birgut, 1992. *Feminism Social Methodology and Rural Women in Java*, London, New Jersey Sed Book Ltd
- Biro Pusat Statistik., 2002. *Biro Pusat Statistik : Jakarta*
- Boserup, Ester, 1998. *Women's Role in Economic Development* : Eastscan Publicaion LTD, London
- Caroline, 1989. *Gender Planning in the third world Meeting Practical and Strategies Gender Needs*. World Development Vol 17 No 1 pp 1799 – 1825, 1989 Printed in Great Britain
- Geertz, H, 1988. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialisation*, Glencoe, The Free Press
- Human Development Report, 1998. Published for UNDP. New York : Oxford University
- Irwan Abdullah, 1997. *Sangkan Paran Gender*. UGM – PPK : Yogyakarta
- ....., 1999. *Wanita ke pasar : studi tentang perubahan sosial ekonomi perdesaan : Populasi 1 (1) 23 – 33, 1990*. UGM : PPK : Yogyakarta
- Ivan Illich, 1998. *Matinya Gender*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta  
*between selected development programmes and the role of rural women in*
- Ken Suratiyah, Marcelinus Molo dan Irwan Abdullah, 1996. *Dilema Wanita antara industri rumah tangga dan aktivitas domestik*, Yogyakarta : Aditya Media
- Koentjaraningrat, 1971. *Rintangan Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. Bharata. Jakarta
- Mansour Fakih, 2002. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- ....., 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Moser, Caroline ON, 1995. *Gender Planning and Development Theory, practice, and Training*. New York : Routledge
- Naomi Wolf, 1997, *Gegar Gender : Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*. Pustaka Semesta Press. Yogyakarta
- Nassaruddin Umar, 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*. Jakarta. Paramadina
- Ratna Megawangi, 1997. *Gender Perspective in Early Childhood Care and Development in Indonesia*. Report Submitted to The Consultative Group on Early Childhood Care and Development, M A, USA.
- ....., 1999. *Membiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi Gender*, Jakarta. Mizan

**BIODATA**

Hastuti, lahir di Sleman tahun 1962 saat ini sebagai tenaga pengajar di Jurusan Pendidikan Geografi, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta dengan mata kuliah pokok Geografi Sosial. Menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana pada Program Studi Geografi, FPS, UGM tahun 1994.

